BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Kajian *Foreign policy analysis (FPA)*, perumusan kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya ditentukan oleh struktur sistem internasional, melainkan sangat dipengaruhi oleh persepsi, kepemimpinan, dan kalkulasi strategis pemimpinnya. Sebagai negara adidaya, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh karakteristik, nilai-nilai, dan gaya kepemimpinan sang presiden yang memegang kewenangan konstitusional sebagai *commander-in chief* dan *chief diplomat* (Hudson, 2014). Dalam konstelasi politik global, dinamika hubungan antara Amerika Serikat,Tiongkok dan Taiwan membentuk kerangka geopolitik yang sangat krusial dan sensitif, yang sering disebut sebagai "segitiga strategis Amerika Serikat-Tiongkok-Taiwan" (*US-China-Taiwan Strategic Triangle).* Setiap pergeseran gaya kepemimpinan di Gedung Putih secara langsung merevaluasi keseimbangan sensitif dalam hubngan lintas selat tersebut.

Sebelum berkuasanya Donald Trump, kebjiakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu Taiwan dan Tiongkok selama bertahun-tahun diwarnai oleh doktrin *Strategic Ambiguity* (ambiguitas strategis) yang konsisten dilanjutkan dari era Barack Obama. Di bawah kepemimpinan Obama (2009-2017), Amerika Serikat mengedepankan pendekatan multilateral, *soft diplomacy*, serta pemeliharaan status quo berdasarkan *One China Policy*, tiga komunike bersama AS-Tiongkok dan Taiwan Relations Act (Campbell & Ratner, 2018). Obama memandang Tiongkok

melalui lensa kompetisi sekaligus kerja sama, sembari menjaga hubungan informal namun kuat dengan Taiwan tanpa memicu konfrontasi terbuka dengan Beijing.

Namun, transisi kepemimpinan Donald Trump (2017-2021) memberikan guncangan mendasar pada dinamika segitiga strategis ini. Berbeda dengan pendahulunya, pada masa pencalonan dan kepemimpinannya sebagai presiden Amerika Serikat, Trump membawa doktrin "*America First"* yang berakar pada nasionalisme, proteksionisme dan transaksionalisme. Trump menunjukkan anomali diplomatik bahkan sebelum dilantik yaitu dengan menerima panggilan telepon langsung dari Presiden Taiwan, Tsai Ing-Wen, Desember 2016 sebuah langkah mendobrak norma diplomatik Amerika Serikat dimana sejak tahun 1979 hubungan diplomatik formal antara Amerika Serikat dan Taiwan terputus. (*The Wall Street Journal*, 2017). Selain itu, selama masa jabatannya, pemerintahan Trump menyetujui paket penjualan senjata ke Taiwan dengan total nilai melebihi US$18 miliar, termasuk penjualan alutsista beradaya serang tinggi seperti jet temput F-16V bernilai US$8 miliar pada tahun 2019 dan sistrem roket HIMARS. (*Ministry Of Foreign Affairs Republic of China* (Taiwan), 2025).

Di sisi lain, untuk mewujudkan keadilan dalam perdagangan internasional yang selama ini dianggap merugikan Amerika Serikat, Trump menetapkan kebijakan tarif pada beberapa produk impor China yang masuk ke Amerika Serikat, seperti; bahan makanan dan produk pertanian, industri kedirgantaraan, teknologi informasi dan komunikasi, alat kesehatan dan perangkat kedokteran, peralatan semikonduktor dan elektronik industri, produk konsumen dan lain-lain. Kebijakan tarif tersebut didasari pada hasiul investigasi dari *Tract Act 1974* dari *Section 301.*

(*United State Trade Representative,* 2018). Akibat dari penetapan tarif ini, Tiongkok dan negara lainnya melakukan balasan penetapan tarif yang memicu terjadinya perang dagang antar Amerika Serikat dan negara negara lainnya.

Kecurigaan praktik ketidakadilan dalam perdagangan internasional ini telah disebutkan oleh Trump dalam pidato kampanye pencalonan dirinya pada tahun 2015. Ia menyebutkan "*they kill us... China beat us, They beat us all the time*" (c-span.org, 2015). Dalam buku "*Cripple America : How To Make Amerika Great Again"* Trump menyampaikan bahwa Tiongkok adalah musuh ekonomi Amerika serikat karena memanfaatkan pekerja berupah renda untuk menghancurkan industri. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Amerika Serikat, memata-matai bisnis dan mencuri teknologi Amerika Serikat, bahkan china dianggap mendevaluasi mata uang mereka sehingga impor barang Amerika serikat lebih mahal (Trump,2015) Meskipun tidak menjadi satu-satunya pemicu penetapan tarif, tetapi sejak pencalonan diri pada tahun 2015, Trump telah menyampaikan dengan terang-terangan rivalitas ekonomi dengan China. Persepsi negatif terhadap China ini secara tidak langsung menggambarkan arah kebijakan yang akan diambil saat menjabat menjadi presiden pada saat itu.

Sementara itu, pada masa pemerintahan Joe Biden (2021-2025), kebijakan luar negeri yang dirumuskan sebenarnya sedikit banyak melanjutkan kebijakan Trump yang mengarah pada penegasan batasan kekuatan politik global tiongkok dengan pendekatan yang institusional dan multilateral. Biden, memperluas dan menjaga hubungan diplomatik antara AS dengan Taiwan yang telah terekonsiliasi pada masa kepemimpinan Trump. Dukungan AS ini juga dapat dilihat dari

kebijakan Biden yang menyetujui penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan dan bahkan pada saat pelantikannya menjadi presiden, Biden mengundang Bi-Khim-Hsiao untuk hadir sebagai perwakilan utama Taipei di Amerika Serikat. Disisi lain, dalam melihat hubungannya dengan Taiwan, Biden berusaha membingkai isu Taiwan sebagai bentuk persaingan antara "demokrasi dan Otoriterisme" serta memperkuat keamanan selat taiwan melalui penguatan aliansi regional yaitu memperkuat keberadaan Quadrilateral security dialogue (QUAD) bersama India, Jepang dan Australia serta membentuk Pakta keamanan AUKUS (AS, Inggris, Australia) untuk mengimbangi ekspansi militer China di Indo-Pasifik. (*Center For Strategic And International Studies,* 2021).

Dari pemaparan diatas mengenai pengambilan keputusan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Penulis melihat adanya pengaruh gaya kepemimpinan Trump yang menyebabkan arah kepemimpinan Trump mendobrak anomali hubungan AS dengan Taiwan dan Tiongkok. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pertanyaan penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan Donald Trump terhadap kebijakan luar negeri amerika serikat dalam dinamika hubungan Amerika Serikat-Tiongkok-Taiwan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan Donald Trump memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam dinamika hubungan antara Amerika Serikat. Tiongkok dan Taiwan, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri, perkembangan konflik, hubungan kerja sama, serta keseimbangan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sebuah manfaat baik dalam bentuk manfaat praktis, maupun akademis. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sumber referensi mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional, serta memberikan gagasan untuk Ilmu Hubungan Internasional, khususnya diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian kebijakan luar negeri melalui pendekatan non-materialis seperti konstruktivisme.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Dalam artikel "*Does Taiwan Matter to the United States? Policy Debates on Taiwan Abandonment and Beyond*" (2018) oleh Gang Lin dan Wenxing Zhou dalam Jurnal *China Review*, artikel ini mengkaji secara mendalam pertanyaan krusial mengenai sejauh mana Taiwan memiliki signifikansi bagi Amerika Serikat, khususnya dalam konteks perdebatan kebijakan terkait potensi penelantaran atau pengabaian Taiwan. Lin dan Zhou memulai dengan mengakui kompleksitas hubungan lintas-selat yang semakin memburuk, yang secara inheren memicu spekulasi tentang perubahan strategi AS terhadap Taiwan. Mereka mengidentifikasi bahwa perdebatan ini tidak hanya berakar pada pertimbangan geopolitik dan ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi historis dan identitas yang mendalam bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, artikel ini secara efektif menyoroti bahwa isu Taiwan bagi AS bukan sekadar perhitungan pragmatis, melainkan juga melibatkan pertimbangan nilai dan komitmen jangka panjang.

Lin dan Zhou tidak hanya membatasi analisis mereka pada perdebatan tentang penelantaran, tetapi juga melampauinya untuk mengeksplorasi implikasi kebijakan di masa depan. Mereka mengusulkan bahwa AS perlu secara cermat menyeimbangkan kepentingannya di kawasan, mengakui kompleksitas hubungan dengan Tiongkok, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mendasari hubungannya dengan Taiwan. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan terus berkembang, Taiwan tetap menjadi bagian integral dari strategi Indo-Pasifik AS, dan keputusan kebijakan di masa depan akan memiliki dampak

yang luas terhadap stabilitas regional dan tatanan internasional. Dengan demikian, artikel ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami perdebatan yang sedang berlangsung dan implikasinya bagi masa depan hubungan AS-Taiwan-Tiongkok.

Dalam artikel "*U.S. Policy Toward Taiwan: Time For Change?"* (2013) oleh Dennis V. Hickey dalam Jurnal *An Asian Affairs : An American Review,* Artikel ini mengkaji secara mendalam kebijakan Amerika Serikat (AS) yang kompleks dan sering kali ambigu terhadap Taiwan, dengan fokus pada periode pasca-normalisasi hubungan diplomatik penuh AS dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1979. Hickey menyoroti inkonsistensi utama dalam kebijakan AS mengenai status internasional Taiwan, masa depan politiknya, dan komitmen keamanannya, yang terlihat dalam Undang-undang Hubungan Taiwan (TRA) dan tiga Komunike Bersama AS-Tiongkok. Inkonsistensi ini menciptakan dilema dalam hubungan AS-Tiongkok, di mana Washington berusaha menyeimbangkan pengakuan "Satu Tiongkok" Beijing dengan dukungan non-resmi yang kuat terhadap Taiwan.

Meskipun terdapat inkonsistensi kebijakan, Hickey mengidentifikasi tren konsisten dalam hubungan AS-Taiwan, yaitu penguatan hubungan bilateral di bidang keamanan, politik, dan ekonomi sejak tahun 1979. Hubungan keamanan semakin dalam dengan Taiwan menjadi pembeli utama persenjataan AS, sementara hubungan politik diperkuat melalui kunjungan pejabat dan dukungan AS untuk partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional. Secara ekonomi, Taiwan tetap menjadi mitra dagang penting bagi AS. Tren ini menunjukkan bahwa, di balik

retorika kebijakan yang ambigu, ada peningkatan substantif dalam keterlibatan AS dengan Taiwan, yang menggarisbawahi kepentingan strategis Washington di Selat Taiwan.

Dalam Artikel "*US-China relations and the Taiwan factor*" (2007) oleh Gang Lin dan Xiaobo Hu dalam *Journal of Contemporary China,* artikel ini membahas kompleksitas hubungan AS-Tiongkok dan peran Taiwan pada tahun 1999, setelah krisis Selat Taiwan 1996. Meskipun hubungan AS-Tiongkok mulai membaik dengan KTT Clinton-Jiang yang membuka peluang kemitraan strategis, isu Taiwan tetap menjadi kontroversi utama. Deklarasi lisan Presiden Clinton mengenai " *Three No's*" (tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, tidak ada dua Tiongkok, tidak ada satu Taiwan satu Tiongkok, dan Taiwan tidak boleh menjadi anggota organisasi yang mensyaratkan kenegaraan) menimbulkan kekhawatiran serius di Taiwan. Para ahli yang berkumpul dalam konferensi di Washington, DC, sepakat bahwa hubungan AS-Tiongkok bersifat asimetris, dengan AS sebagai satu-satunya negara adidaya, meskipun dianggap "frustrasi" di kawasan Pasifik karena kurangnya persiapan dan pemahaman terhadap Asia. Terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli dari Tiongkok, AS, dan Taiwan mengenai masa depan hubungan bilateral; ahli Tiongkok optimistis, sementara ahli AS dan Taiwan lebih hati-hati dan skeptis, terutama mengingat kekhawatiran Kongres AS terhadap potensi ekonomi dan militer Tiongkok.

Peran AS dalam hubungan lintas selat adalah menjaga status quo dan keseimbangan kekuatan, meskipun Taiwan menginginkan dukungan AS untuk ruang internasional yang lebih besar, sementara Beijing mengharapkan AS

menyerahkan masalah Taiwan kepada Tiongkok atau mendukung reunifikasi. Dialog politik lintas selat menunjukkan pesimisme dari ahli Taiwan karena kurangnya konsensus internal, sementara ahli Tiongkok lebih optimis, mencatat fleksibilitas posisi Beijing dalam beberapa tahun terakhir. Isu-isu kunci dalam negosiasi masa depan meliputi makna "*One China Policy*", ruang internasional Taiwan, dan "*three links*" (perdagangan, transportasi, pos), yang masing-masing memiliki interpretasi dan kekhawatiran yang berbeda di antara pihak-pihak terkait. Meskipun ada perbedaan pendapat, dialog berkelanjutan melalui berbagai saluran dianggap penting untuk mencapai pemahaman bersama dan meningkatkan hubungan AS-Tiongkok serta hubungan lintas selat Taiwan.

Dalam artikel "*Analyzing the Evolution of China-Taiwan Relations: US as a Factor*" (2025) dari Ayesha Atiq, Hafsa Zafar and Dr. Ghulam Mustafa dalam Jurnal *Pakistan Social Sciences Review,* Hubungan antara Tiongkok (PRC) dan Taiwan (ROC) merupakan salah satu titik api paling berbahaya di dunia, dengan potensi konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat [cite: 9]. Isu ini berakar pada Perang Saudara Tiongkok dan Perang Dingin, yang tidak pernah terselesaikan dan kini menjadi semakin mendesak. Sejak 1949, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai wilayahnya yang memisahkan diri, dengan tujuan untuk menyatukannya kembali dengan daratan utama Tiongkok. Meskipun Amerika Serikat secara resmi mengakui pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai otoritas yang sah atas Tiongkok pada tahun 1979 dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, negara ini tetap mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan di bawah Undang-undang Hubungan Taiwan, yang menjamin dukungan pertahanan dan

pasokan senjata. Pendekatan Amerika Serikat terhadap isu ini sering digambarkan sebagai "ketidakpastian strategis".

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan militer di Selat Taiwan dan tuntutan reunifikasi Tiongkok dengan Taiwan telah menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Amerika Serikat. Keunggulan militer Tiongkok yang semakin meningkat atas Taiwan menjadi perhatian bagi Amerika Serikat, yang tidak mengakui kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Meskipun Amerika Serikat mendukung kebijakan "Satu Tiongkok", negara ini menentang tindakan sepihak oleh pihak mana pun untuk mengubah status *quo* yang ada dan menganjurkan penyelesaian masalah secara damai. Namun, retorika garis keras dari pemerintahan Trump dan Biden yang mendukung Taiwan telah meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok. Opini publik di Taiwan juga terbagi, dengan sebagian besar masyarakat ingin mempertahankan status *quo*, meskipun ada perbedaan pandangan terkait kemerdekaan atau unifikasi tergantung pada tingkat bantuan AS dan ancaman yang dirasakan dari Tiongkok.

Dalam artikel "*The U.S.-China Trade Confrontation and Taiwan's New Southbound Policy: An Economic Security Perspective*" (2019) oleh Shih-chung Liu dalam Jurnal *Taiwan Strategist*, Artikel ini membahas Kebijakan Baru ke Arah Selatan (New Southbound Policy/NSP) Taiwan dalam konteks konfrontasi dagang AS-Tiongkok dan evolusi hubungan ekonomi lintas selat. Penulis berpendapat bahwa NSP, yang diperkenalkan oleh pemerintahan Tsai Ing-wen lebih dari dua tahun lalu, merupakan upaya strategis Taiwan untuk mendiversifikasi perdagangan dan investasinya ke pasar-pasar berkembang lainnya, serta mengejar hubungan

lintas selat yang lebih seimbang, adil, dan timbal balik. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap perubahan struktural di lingkungan investasi Tiongkok yang menyebabkan penarikan bertahap bisnis Taiwan dari pasar tersebut, dipercepat oleh friksi dagang AS-Tiongkok.

Sejak pertengahan 1990-an, Taiwan telah mengalami "Perdebatan Besar" tentang bagaimana mengejar hubungan ekonomi lintas selat yang seimbang. Pemerintahan Lee Teng-hui menerapkan kebijakan "berhati-hati dan menahan diri" serta gelombang pertama "kebijakan bergerak ke selatan" untuk mendiversifikasi investasi asing dan menghindari ketergantungan pada pasar Tiongkok. Meskipun pemerintahan Chen Shui-bian mengimplementasikan kebijakan "pembukaan proaktif dan manajemen efektif", hal ini mengakibatkan ketergantungan berlebihan pada pasar Tiongkok. Ketika Tsai Ing-wen menjabat pada tahun 2016, NSP secara resmi diluncurkan sebagai strategi keamanan nasional untuk mendiversifikasi jangkauan perdagangan Taiwan dan mempererat hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Pemerintahan Tsai mengidentifikasi tiga perubahan struktural: kenaikan upah di Tiongkok, munculnya pasar-pasar potensial di Asia Tenggara dan Selatan, dan kebutuhan Taiwan untuk menjajaki cara-cara keterlibatan lain untuk menghindari isolasi internasional. Oleh karena itu, NSP memiliki empat tujuan: kerja sama ekonomi dan perdagangan, pertukaran talenta, berbagi sumber daya, dan konektivitas regional, dengan penekanan pada pendekatan yang berpusat pada masyarakat.

Menanggapi konfrontasi dagang AS-Tiongkok, pemerintah Taiwan telah mengadopsi empat langkah respons kunci untuk memastikan keamanan

ekonominya. Pertama, gugus tugas pemerintah dibentuk untuk mengatasi masalah tanah, pajak, dan regulasi bagi perusahaan Taiwan di luar negeri yang merelokasi produksi kembali ke Taiwan, dengan investasi yang dijanjikan melebihi $20 miliar USD pada Oktober 2019. Kedua, pemerintah berupaya ekstra membantu perusahaan Taiwan beralih ke pasar NSP, yang telah terbukti menjadi strategi berwawasan ke depan. Ketiga, pemerintah memanfaatkan NSP untuk memperluas kerja sama dengan strategi Indo-Pasifik pemerintahan Trump dan inisiatif "Konektivitas Uni Eropa-Asia", yang membantu Taiwan mendiversifikasi pasarnya. Keempat, tujuan utama NSP adalah membangun momentum bagi Taiwan untuk bernegosiasi secara bilateral dan multilateral guna bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) serta memperkuat perannya di APEC dan WTO. Artikel ini menyimpulkan bahwa NSP adalah visi berwawasan ke depan dan diplomasi preventif yang penting bagi Taiwan dalam menghadapi upaya Beijing untuk menelan Taiwan secara internasional dan menganeksasinya melalui cara-cara politik dan ekonomi.

Penelitian mengenai dinamika hubungan antara Tiongkok dan Taiwan, serta peran Amerika Serikat di dalamnya, telah banyak dikaji oleh para ahli. Berbagai studi telah menyoroti kompleksitas hubungan ini, yang sering kali digambarkan sebagai "*love-hate*" karena adanya ketergantungan ekonomi di samping persaingan politik yang memanas. Studi oleh Lin dan Zhou (2018) dalam "*Does Taiwan Matter to the United States? Policy Debates on Taiwan Abandonment and Beyond*" secara mendalam mengkaji signifikansi Taiwan bagi Amerika Serikat, termasuk perdebatan mengenai potensi pengabaian Taiwan dan implikasi kebijakan di masa

depan, dengan menekankan bahwa isu Taiwan melibatkan pertimbangan nilai dan komitmen jangka panjang AS. Senada dengan hal tersebut, Hickey (2013) dalam "*U.S. Policy Toward Taiwan: Time For Change?"* menganalisis inkonsistensi kebijakan AS terhadap Taiwan pasca-normalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1979, namun mengidentifikasi tren penguatan hubungan bilateral AS-Taiwan di bidang keamanan, politik, dan ekonomi. Atiq, Zafar, dan Mustafa (2025) dalam "*Analyzing the Evolution of China-Taiwan Relations: US as a Factor*" juga membahas "ketidakpastian strategis" AS dan peningkatan ketegangan militer di Selat Taiwan, terutama dengan retorika garis keras dari pemerintahan Trump dan Biden yang mendukung Taiwan. Sementara itu, Lin dan Hu (2007) dalam "*US-China relations and the Taiwan factor*" menyoroti peran AS dalam menjaga status *quo* dan keseimbangan kekuatan di Selat Taiwan, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara Tiongkok, AS, dan Taiwan mengenai masa depan hubungan bilateral. Liu (2019) dalam "*The U.S.-China Trade Confrontation and Taiwan's New Southbound Policy: An Economic Security Perspective*" memberikan perspektif ekonomi dengan membahas Kebijakan Baru ke Arah Selatan Taiwan sebagai respons terhadap konfrontasi dagang AS-Tiongkok, yang bertujuan untuk mendiversifikasi perdagangan Taiwan dan mempererat hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Meskipun kajian-kajian sebelumnya telah banyak membahas keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Tiongkok-Taiwan dari berbagai perspektif, termasuk konteks militer dan strategi *containment* terhadap Tiongkok, masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana gaya

kepemimpinan seorang presiden, khususnya Donald Trump, memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam dinamika antara Amerika Serikat-Tiongkok dan Taiwan. Penelitian oleh Lestari & Yusran (2023) dan Perkasa (2023) cenderung menyoroti aspek militer dan strategi *containment*, namun belum banyak membahas gaya kepemimpinan Trump sebagai variabel utama. Urgensi penelitian ini terletak pada pendekatan *leader-driven theory*, yang memandang bahwa sikap individu seorang pemimpin dapat memengaruhi arah kebijakan suatu negara, dan dalam konteks ini, karakter Trump yang transaksional, populis, dan nasionalistis secara signifikan memengaruhi gaya kepemimpinannya. Terlebih lagi, dengan kemungkinan kembalinya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2025, yang diiringi dengan perubahan dalam pendekatan AS terhadap konflik ini, seperti hilangnya frasa "kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan" dari pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS pada Februari 2025 dan sikap ambigu Trump terhadap intervensi militer, menunjukkan potensi arah baru dalam kebijakan luar negeri AS.

1.5.2 *Leadership Trait Analysis* (LTA)

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Leadership Trait Analysis* (LTA) yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann untuk menjelaskan bagaimana karakteristik individu seorang pemimpin memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Pendekatan ini berasal dari asumsi bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti sistem internasional dan kepentingan internasional, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pemimpin.

Dalam kajian hubungan internasional, *Leadership Trait Analysis* (LTA) merupakan bagian dari pendekatan *actor-specific theory* yang berfokus pada peran individu sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri. Melalui pendekatan ini, pemimpin tidak dipandang hanya sebagai pelaksana kebijakan negara, melainkan sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk membentuk arah dan isi kebijakan luar negeri berdasarkan persepsi, keyakinan, serta karakteristik kepribadiannya (Hudson, 2005).

Pendekatan yang digunakan dalam teori ini merupakan pendekatan psikologi politik dalam kajian analisis kebijakan luar negeri. Fokus pendekatan ini adalah pada bagaimana kepribadian, gaya kepemimpinan, persepsi, dan keyakinan individu pemimpin membentuk kebijakan luar negeri negara yang mereka pimpin. Hermann mengembangkan alat analisis dikenal dengan *Leadership Trait Analysis* (LTA) untuk mengukur bagaimana sifat-sifat kepribadian tertentu dapat memengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri oleh pemimpin negara.

Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Margaret G. Hermann pada tahun 1980-an dan mengalami penyempurnaan melalui sejumlah studi lanjutan, termasuk dalam karyanya yang *"Assessing Leadership Style: Trait Analysis"* (2002). Dalam tulisan tersebut, Hermann memformulasikan tujuh variabel kepribadian utama yang dapat ditukar untuk mengidentifikasi gaya seseorang dalam memimpin, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri. Teori ini terus berkembang dan digunakan untuk menganalisis tokoh-tokoh penting seperti George W. Bush, Saddam Husein, hingga Donald Trump dalam kajian kontemporer.

Menurut Margaret G. Hermann (2002), terdapat tujuh ciri perbedaan utama dalam *Leadership Trait Analysis* (LTA) yang digunakan untuk mengkaji gaya kepemimpinan seorang tokoh, yakni:

1. Kepercayaan terhadap kemampuan mengendalikan peristiwa

   Pemimpin dengan ciri ini meyakini bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memengaruhi jalannya peristiwa dan bukan sekadar menjadi objek dari kondisi eksternal. Dalam konteks kebijakan luar negeri, pemimpin seperti ini cenderung bersikap proaktif, melakukan intervensi, dan berusaha mengendalikan dinamika hubungan internasional.

2. Kebutuhan akan kekuasaan

   Ciri ini mengukur seberapa besar dorongan seorang pemimpin untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Pemimpin dengan kebutuhan kekuasaan tinggi biasanya lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak segan menunjukkan pengaruhnya dalam politik internasional. Dalam konteks kebijakan luar negeri, hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kepemimpinan unilateral, tekanan diplomatik, atau penguatan pengaruh militer dan ekonomi.

3. Kompleksitas konseptual

   Kompleksitas konseptual menunjukkan sejauh mana seorang pemimpin mampu memahami isu-isu dengan banyak dimensi, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mengelola ambiguitas dalam pengambilan keputusan.

4. Kepercayaan diri

   Pemimpin dengan ciri ini mencerminkan tingkat keyakinan terhadap kemampuan dan penilaiannya sendiri. Pemimpin yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan merasa yakin bahwa keputusan mereka benar, bahkan ketika mendapat kritik atau tekanan eksternal.

5. Orientasi pada tugas dibanding hubungan

   Ciri ini mengukur seorang pemimpin lebih berfokus pada pencapaian hasil dan tujuan strategis, atau lebih menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan aktor lain. Pemimpin yang berorientasi pada tugas cenderung kurang memperhatikan sensitivitas hubungan diplomatik. Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada hubungan lebih hati-hati dan mengutamakan kerja sama jangka panjang.

6. Tingkat kecurigaan terhadap pihak lain (*distrust of others)*

   Ciri ini merujuk pada tingkat kecurigaan atau ketidakpercayaan seorang pemimpin terhadap perilaku pihak lain. Pemimpin dengan kecurigaan tinggi cenderung defensif, dan lebih mungkin mengadopsi kebijakan yang protektif atau agresif. Hal ini mempengaruhi hubungan internasional, terutama dalam situasi konflik atau persaingan strategis.

7. Bias terhadap kelompok sendiri *(in-group bias)*

   Ciri menggambarkan kecenderungan pemimpin untuk lebih memihak kelompoknya sendiri dan kurang terbuka terhadap pihak luar. Dalam konteks global, bias ini dapat berdampak pada meningkatnya nasionalisme dan ketegangan diplomatik.

Dengan mempertimbangkan karakteristik gaya kepemimpinan Donald Trump yang kuat, dominan, dan penuh kontroversi, teori *Leadership Trait Analysis* (LTA) dari Margaret G. Hermann menjadi pendekatan yang tepat dan relevan untuk menganalisis arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahannya. Hermann menekankan bahwa karakter dan kepribadian seorang pemimpin dapat menjadi determinan penting dalam mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam penelitian ini, tidak seluruh tujuh karakteristik LTA digunakan sebagai kategori analisis. Penelitian dibatasi pada lima karakteristik, yaitu *need for power, self-confidence, distrust of others, in-group bias,* dan *low conceptual complexity*, karena kelima karakteristik tersebut memiliki relevansi paling langsung dengan fokus penelitian mengenai penggunaan tekanan, persepsi terhadap aktor lain, orientasi kepentingan nasional, serta cara Trump membingkai isu Tiongkok-Taiwan. Sementara itu*, belief in ability to control events* dan *task orientation versus relationship orientation* tidak digunakan sebagai kategori utama karena tidak menjadi fokus analisis penelitian ini.

Dalam konteks Trump, sejumlah ciri kepribadian seperti kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan (*need for power*), kepercayaan diri yang besar (*self-confidence*), tingkat kecurigaan yang tinggi terhadap pihak luar (*distrust of others*), bias terhadap kelompok sendiri (*in-group bias*), serta kompleksitas kognitif yang relatif rendah (*low conceptual complexity*) tercermin dalam berbagai keputusan kebijakan luar negeri terutama dalam dinamika hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok dan Taiwan. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan kerangka

analitis yang memadai untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan Trump membentuk sikap dan posisi strategis Amerika Serikat dalam konteks hubungan internasional yang penuh ketegangan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan proses penerapan konsep-konsep teoritis yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya ke dalam penelitian sebagai alat analisis. Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep dibagi menjadi dua bagian, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Adapun konsep yang digunakan terdiri atas Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan *Leadership Trait Analysis* (LTA).

1.6.1. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

1.6.1.1 Definisi Konseptual

Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi yang dirancang oleh negara untuk mengatur interaksinya dengan aktor internasional lain demi mencapai tujuan nasional. Menurut Holsti (1983), kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai tindakan dan sikap suatu negara yang direncanakan dan diarahkan terhadap lingkungan eksternal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks studi hubungan internasional, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem internasional, kepentingan nasional, tekanan domestik, dan karakteristik pemimpin yang memegang kekuasaan. Dalam penelitian ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dioperasionalisasikan dalam berbagai keputusan, tindakan, dan pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat yang berkaitan dengan dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2025.

1.6.1.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dioperasionalisasikan sebagai berbagai keputusan, tindakan, dan pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat yang berkaitan dengan dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2025. Untuk mengidentifikasi kebijakan luar negeri tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa indikator, yaitu: (1) kebijakan diplomatik Amerika Serikat terhadap Taiwan dan Tiongkok; (2) pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat terkait isu Taiwan; (3) kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang berkaitan dengan Tiongkok; serta (4) kebijakan keamanan dan pertahanan Amerika Serikat yang berkaitan dengan Taiwan.

1.6.2. *Leadership Trait Analysis* (LTA)

1.6.2.1 Definisi Konseptual

Hermann (2002) menjelaskan bahwa *Leadership Trait Analysis* (LTA) merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann untuk menganalisis bagaimana karakteristik kepribadian seorang pemimpin memengaruhi proses pengambilan keputusan, khususnya dalam kebijakan luar negeri. Pendekatan ini berasal dari asumsi bahwa pemimpin memiliki peran yang penting dalam membentuk kebijakan negara melalui persepsi, keyakinan, dan gaya kepemimpinannya. Oleh karena itu, LTA digunakan untuk memahami hubungan antara karakteristik individu pemimpin dan kebijakan yang dihasilkan dalam konteks hubungan internasional.

1.6.2.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, *Leadership Trait Analysis* (LTA) dioperasionalisasikan melalui lima karakteristik kepemimpinan Donald Trump yang dianggap paling relevan dalam menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2025. Kelima karakteristik tersebut meliputi kebutuhan akan kekuasaan (*need for power*), kepercayaan diri (*self-confidence*), tingkat kecurigaan terhadap pihak lain (*distrust of others*), bias terhadap kelompok sendiri (*in-group bias*), dan kompleksitas konseptual (low *conceptual complexity*). Kelima karakteristik digunakan sebagai alat analisis bagaimana gaya kepemimpinan Donald Trump memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam dinamika hubungan Tiongkok-Taiwan tahun 2025. Adapun indikator analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Karakteristik	Indikator Analisis
Need for Power	Keinginan untuk menunjukkan dominasi dan pengaruh dalam kebijakan luar negeri
Self-Confidence	Tingkat keyakinan terhadap keputusan dan penilaiannya sendiri
Distrust of Others	Tingkat kecurigaan terhadap aktor atau negara lain
In-Group Bias	Kecenderungan mengutamakan kepentingan kelompok atau negara sendiri
Low Conceptual Complexity	Kemampuan memahami isu melalui berbagai perspektif atau kecenderungan menyederhanakan permasalahan

Tabel 1.1 Operasionalisasi Leadership Trait Analysis (LTA)

(Sumber: Diolah penulis berdasarkan Hermann, 2002)

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa karakteristik kepemimpinan Donald Trump dapat membantu menjelaskan kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2025, khususnya dalam penggunaan tekanan ekonomi, dukungan strategis terhadap Taiwan, orientasi America First, serta pemeliharaan fleksibilitas strategis.

Dalam kerangka ini, *Leadership Trait Analysis* digunakan untuk mengidentifikasi karakter kepemimpinan Trump yang memiliki dampak signifikan terhadap arah kebijakan luar negeri. Pendekatan ini berfokus pada ciri-ciri kepribadian yang cenderung menetap dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, terutama dalam isu luar negeri yang bersifat sensitif dan strategis. Berdasarkan literatur sebelumnya, terdapat lima ciri dominan yang melekat pada sosok Donald Trump, yakni kebutuhan akan kekuasaan (*need for power*), tingkat kepercayaan diri yang tinggi (*self-confidence*), tingkat kecurigaan terhadap pihak lain (*distrust of others*), bias terhadap kelompok sendiri (*in-group bias*), serta kompleksitas konseptual yang relatif rendah (*low conceptual complexity*).

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana masing-masing dari kelima ciri tersebut tercermin dalam kebijakan luar negeri Trump terhadap konflik Taiwan–Tiongkok. Dengan cara ini, penelitian ini mencoba menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya merupakan respons rasional terhadap kondisi eksternal, melainkan juga hasil dari konstruksi psikologis dan persepsi personal pemimpin negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris. Sesuai dengan pandangan Yin, desain studi kasus sesuai digunakan untuk meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terdefinisi secara jelas (Yin, 2018). Desain ini digunakan untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Taiwan pada masa pemerintahan Donald Trump tahun 2025. Menurut Creswell, penelitian kualitatif dengan desain studi kasus merupakan metode yang sangat efektif untuk menggali pertanyaan terkait "bagaimana" dan "mengapa" suatu fenomena kontemporer terjadi (Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana karakteristik kepemimpinan Donald Trump yang diidentifikasi melalui *Leadership Trait Analysis* dapat membantu menjelaskan kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2025.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berfokus pada konteks geopolitik kawasan Indo-Pasifik sebagai "situs" non-fisik, mengingat objek studi berupa kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) dalam hubungan trilateral AS-Tiongkok-Taiwan. Kawasan ini dipilih karena menjadi salah satu wilayah yang paling strategis dalam persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya terkait isu Taiwan yang memiliki posisi penting dalam keamanan regional dan keseimbangan kekuatan di Asia Timur.

Situs penelitian mencakup berbagai dinamika politik, keamanan, dan ekonomi yang terjadi dalam hubungan Tiongkok–Taiwan, serta keterlibatan Amerika Serikat di dalamnya melalui kebijakan luar negeri, pernyataan resmi pemerintah, dan tindakan diplomatik yang dilakukan pada masa pemerintahan Donald Trump. Selain itu, penelitian juga mencakup berbagai institusi yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, seperti Gedung Putih (*White House*), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (*U.S. Department of State*), Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*U.S. Department of Defense*), serta berbagai dokumen kebijakan dan pernyataan resmi yang berkaitan dengan isu Taiwan dan hubungan Amerika Serikat–Tiongkok.

Pemilihan situs penelitian ini didasarkan pada pentingnya kawasan Indo-Pasifik sebagai arena utama persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta meningkatnya perhatian internasional terhadap dinamika hubungan Tiongkok–Taiwan yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan kawasan maupun tatanan politik internasional.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2025 beserta kebijakan luar negeri yang diambil pemerintahannya terkait dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan. Fokus penelitian diarahkan pada berbagai kebijakan, pernyataan resmi, serta sikap politik Donald Trump yang berkaitan dengan hubungan Amerika Serikat, Tiongkok dan Taiwan.

Selain itu, penelitian ini juga menempatkan dinamika hubungan Tiongkok–Taiwan sebagai objek yang dianalisis, khususnya yang berkaitan dengan ketergantungan ekonomi, ketegangan politik, dan perkembangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Dinamika tersebut digunakan untuk memahami konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat serta bagaimana karakteristik kepemimpinan Donald Trump memengaruhi respons dan posisi Amerika Serikat terhadap konflik Tiongkok-Taiwan pada tahun 2025.

1.8.4 Jenis Data

Sumber data merujuk pada segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data. Berdasarkan asalnya, data terbagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau lokasi penelitian, dengan tujuan khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Sementara itu, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kepentingan lain di luar permasalahan yang sedang ditangani dan dapat diakses dengan cepat. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang relevan dengan topik penelitian. (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian ini menggunakan data dokumenter yang terdiri atas corpus verbal Donald Trump sebagai data utama analisis dan berbagai dokumen akademik, kebijakan, laporan, serta publikasi institusional sebagai data kontekstual.

1.8.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dokumenter yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Data penelitian terdiri atas *corpus*

verbal Donald Trump sebagai data utama analisis dan berbagai dokumen sebagai data kontekstual. *Corpus* verbal Donald Trump meliputi pidato, konferensi pers, pernyataan dalam pertemuan internasional, pernyataan spontan (*spontaneous remarks*), serta unggahan media sosial resmi yang relevan dengan hubungan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Taiwan pada tahun 2025.

Sementara itu, data kontekstual digunakan untuk memberikan konteks terhadap *corpus* verbal dan membantu memahami kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam dinamika hubungan Tiongkok-Taiwan. Data kontekstual tersebut meliputi dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, seperti dokumen kebijakan luar negeri dan dokumen terkait hubungan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Taiwan, serta laporan dari lembaga *think tank*. Selain itu, penelitian ini menggunakan buku, artikel ilmiah, jurnal internasional, dan publikasi resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang relevan melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta literatur lain yang berkaitan dengan hubungan Tiongkok–Taiwan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan gaya kepemimpinan Donald Trump. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi, seperti pidato Presiden Amerika Serikat, dokumen kebijakan luar negeri, laporan pemerintah, pernyataan resmi, serta berbagai

publikasi yang berkaitan dengan dinamika hubungan Tiongkok–Taiwan pada tahun 2025.

Menurut Bowen (2009), analisis dokumen merupakan metode yang efektif dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data secara sistematis dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menganalisis pengaruh karakteristik kepemimpinan Donald Trump terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konflik Tiongkok–Taiwan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif. Menurut Krippendorff (2019), analisis konten merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam suatu teks secara sistematis. Dalam penelitian ini, analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan Donald Trump yang tercermin dalam berbagai pernyataan, pidato, maupun kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Taiwan.

Untuk menganalisis karakteristik kepemimpinan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Leadership Trait Analysis (LTA) yang dikembangkan oleh Hermann (2002). Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan Donald Trump yang tercermin dalam berbagai pernyataan dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya. Analisis difokuskan pada lima karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kebutuhan akan kekuasaan (*need for power*), kepercayaan diri (*self-confidence*), tingkat kecurigaan

terhadap pihak lain (*distrust of others*), bias terhadap kelompok sendiri (*in-group bias*), dan kompleksitas konseptual rendah (low *conceptual complexity*). Kelima karakteristik tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan Donald Trump memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Tiongkok–Taiwan pada tahun 2025.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh dari berbagai sumber data yang relevan.

Setelah corpus verbal dikumpulkan, peneliti melakukan identifikasi terhadap unit verbal yang relevan berupa kata, frasa, atau konstruksi verbal yang menunjukkan indikator karakteristik LTA. Setiap unit data kemudian dibandingkan dengan indikator operasional dari lima karakteristik yang digunakan dalam penelitian, yaitu *need for power, self-confidence, distrust of others, in-group bias,* dan *low conceptual complexity*. Data dikategorikan berdasarkan karakteristik yang paling dominan ditunjukkan oleh konteks verbal tersebut. Setelah proses kategorisasi dilakukan, data yang memiliki karakteristik serupa dibandingkan untuk mengidentifikasi pola verbal dalam masing-masing trait. Hasil identifikasi pola tersebut kemudian diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2025.

1.8.8 Kualitas Data *(goodness criteria)*

Triangulasi berbagai sumber data dengan memeriksa bukti dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi yang koheren untuk penelitian. Jika penelitian ditetapkan berdasarkan konvergensi beberapa sumber

data atau perspektif dari peserta, maka proses ini dapat diklaim sebagai penambahan validitas studi (Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui perbandingan berbagai sumber data sekunder, seperti dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, pidato dan pernyataan Donald Trump, laporan lembaga *Think Tank*, jurnal ilmiah, serta berbagai publikasi yang relevan dengan dinamika hubungan Tiongkok-Taiwan.